

ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS MASYARAKAT STUDI KASUS: STATEMENT AHMAD SAHRONI

Umar Sahid¹, Dewi Asih Nusantara², Syifa Hasna Afifah³, Khalisya Tzanisa⁴,
Muhammad Isa Asyrofuddin⁵

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

1sahidumar492@gmail.com, 2asihnusantaradewi@gmail.com,
3syifahsnana@gmail.com, 4ktzanisa@gmail.com, 5miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

Public communication ethics play a crucial role in maintaining societal stability, particularly when messages are delivered by influential political figures. This study examines Ahmad Sahroni's statement in the context of the August 25, 2025, demonstrations, which elicited widespread public reaction. The research focuses on how Sahroni's communication ethics impacted social stability, and how the media and the public responded to the statement. The method used was a descriptive qualitative approach with literature analysis. The theoretical framework included Aristotle's rhetorical theory (ethos, logos, pathos), McCombs & Shaw's agenda-setting theory, Shannon & Weaver's communication model, political communication theory, and communication ethics theory. The results show that Ahmad Sahroni's statement did not align with the principles of communication ethics, as it created a perception of demeaning the public and fueled social dissatisfaction. The mass media then amplified this issue through agenda-setting, thus amplifying its impact on public opinion. The resulting disruption to societal stability resulted in protests, decreased trust in the House of Representatives (DPR), and increased political tension. This study emphasizes the importance of public communication ethics in building trust and maintaining social stability. For students, this study provides practical learning about the close relationship between political communication, ethics, and their impact on social life.

Keywords: Communication Ethics, Public Communication, Societal Stability, Ahmad Sahroni, Political Communication

ABSTRAK

Etika komunikasi publik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat, khususnya ketika pesan disampaikan oleh tokoh politik yang memiliki pengaruh besar. Penelitian ini mengkaji pernyataan Ahmad Sahroni dalam konteks aksi demonstrasi 25 Agustus 2025, yang menimbulkan reaksi luas dari masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana etika komunikasi Sahroni berimplikasi terhadap stabilitas sosial, serta bagaimana media dan masyarakat merespons

pernyataan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori retorika Aristoteles (ethos, w logos, pathos), teori agenda setting McCombs & Shaw, model komunikasi Shannon & Weaver, teori komunikasi politik, dan teori etika komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni tidak sesuai dengan prinsip etika komunikasi, karena menimbulkan persepsi merendahkan publik dan memicu ketidakpuasan sosial. Media massa kemudian memperkuat isu ini melalui agenda setting, sehingga memperbesar dampak terhadap opini publik. Dampaknya adalah terganggunya stabilitas masyarakat berupa aksi protes, penurunan kepercayaan terhadap DPR, dan meningkatnya ketegangan politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya etika komunikasi publik dalam membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas sosial. Bagi mahasiswa, kajian ini menjadi pembelajaran praktis tentang hubungan erat antara komunikasi politik, etika, dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Etika Komunikasi, Komunikasi Publik, Stabilitas Masyarakat, Ahmad Sahroni, Komunikasi Politik

A. Pendahuluan

Komunikasi publik merupakan proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada khalayak luas melalui berbagai saluran dengan tujuan membentuk opini, sikap, maupun perilaku publik. Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui saluran tertentu yang dapat dipengaruhi oleh noise atau gangguan yang dapat menghambat efektivitas pesan. Dalam konteks komunikasi publik, proses tersebut tidak hanya dipahami sebagai aliran informasi, tetapi sebagai mekanisme strategis untuk membangun relasi antara pejabat,

masyarakat, dan institusi negara dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan legitimasi politik.

Praktik komunikasi publik idealnya dijalankan berdasarkan prinsip etika. Etika komunikasi berfungsi sebagai pedoman moral yang menuntun komunikator untuk bertindak secara jujur, adil, transparan, serta mempertimbangkan dampak pesan terhadap audiens. Johannesen menegaskan bahwa komunikasi etis bukan hanya memastikan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga menjaga penghormatan terhadap martabat manusia serta menghindari kerusakan sosial. Dalam konteks politik, pentingnya etika komunikasi menjadi

semakin krusial karena pernyataan tokoh publik dapat memengaruhi dinamika sosial secara luas dan memicu konsekuensi yang menyentuh stabilitas masyarakat.

Fenomena pernyataan Ahmad Sahroni pada 22 Agustus 2025 menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran etika komunikasi berpotensi menciptakan gejolak sosial. Ucapannya yang menyebut bahwa pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “tolol sedunia” (Detik.com, 2025) bukan hanya dianggap merendahkan kelompok tertentu, tetapi juga memancing kemarahan publik hingga berujung pada demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Kasus ini menunjukkan bahwa pernyataan seorang politisi tidak dapat dipandang sekadar sebagai ekspresi personal, melainkan bagian dari komunikasi politik yang membawa implikasi sosial dan politik yang signifikan. Nimmo (2000) menegaskan bahwa setiap komunikasi politik selalu mengandung konsekuensi dalam distribusi kekuasaan dan nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, ucapan yang tidak etis dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

perwakilan, memperkuat polarisasi, serta membuka ruang bagi ketidakstabilan sosial.

Peran media sosial semakin memperkuat dampak tersebut. Melalui lensa Teori Agenda Setting McCombs dan Shaw, media memiliki kemampuan untuk mengarahkan fokus publik pada isu tertentu melalui penonjolan isu. Viralitas potongan pernyataan Sahroni yang beredar luas di platform digital menunjukkan bagaimana media dapat memperbesar dampak sebuah pernyataan melalui framing negatif dan penyebaran masif oleh pengguna. Proses ini tidak hanya meningkatkan perhatian publik terhadap isu tersebut, tetapi juga menciptakan resonansi emosional yang mempercepat eskalasi protes dan kemarahan kolektif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi publik yang buruk cenderung memperbesar keresahan masyarakat. Khoiriyah (2021) menemukan bahwa komunikasi pejabat publik yang provokatif atau tidak transparan menjadi faktor pemicu ketidakstabilan sosial. Temuan tersebut memperkuat relevansi studi ini, terutama karena peristiwa viral pada era digital dapat

dengan cepat mengubah persepsi publik dan memperburuk krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Penelitian terdahulu mengenai etika komunikasi pejabat publik telah dilakukan, misalnya oleh Fahrudin (2021) yang mengkaji etika komunikasi pemerintah dalam konteks pandemi Covid-19. Namun, fokus penelitian tersebut masih berkisar pada isu kesehatan publik dan belum menelaah secara khusus hubungan antara pernyataan politikus, framing media sosial, dan eskalasi demonstrasi di Indonesia pasca-2024. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana komunikasi politik yang melanggar etika, terutama yang viral di media digital, dapat memengaruhi stabilitas sosial dalam skala nasional.

Perbandingan dengan penelitian Adli, Erik Asmara, dan Desy Misnawati menunjukkan bahwa meskipun sama-sama menyoroti peran etika komunikasi, konteks penelitian mereka berada di tingkat mikro (komunikasi pemimpin desa dan perubahan perilaku masyarakat). Sebaliknya, penelitian ini bergerak pada tingkat makro dengan fokus pada tokoh politik nasional dan

pengaruhnya terhadap dinamika sosial-politik melalui media digital. Penelitian Adli dkk. belum mengkaji peran media sosial dalam membingkai persepsi publik, padahal platform digital merupakan ruang kontemporer yang sangat menentukan pola komunikasi publik di Indonesia modern.

Penelitian Simandjuntak (2024), yang membahas dampak sosial-politik dari upaya pemberhentian presiden, menunjukkan bahwa peristiwa politik besar dapat memicu polarisasi dan krisis legitimasi. Namun, penelitian tersebut belum membahas faktor komunikasi publik dan dinamika viralitas media sosial sebagai pemicu konflik politik. Penelitian ini melengkapi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana pernyataan pejabat publik dapat memengaruhi opini publik secara cepat melalui digitalisasi informasi.

Studi Siti Ulfa Khoiriyah (2021) mengenai etika komunikasi pemerintah dalam penanganan pandemi melalui perspektif Al-Qur'an juga memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bagaimana qaulan yang etis dapat meredam krisis. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada komunikasi

pemerintah dalam kondisi krisis kesehatan, bukan pada dinamika komunikasi politik tokoh legislatif yang memicu eskalasi sosial pasca-pandemi.

Melalui berbagai perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat gap penelitian yang cukup jelas, yaitu minimnya kajian mengenai hubungan antara komunikasi politik, viralitas media sosial, framing digital, dan dampak sosial-politik dalam konteks Indonesia kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah itu dengan menganalisis kasus pernyataan Ahmad Sahroni sebagai contoh bagaimana komunikasi publik yang melanggar etika dapat menciptakan keresahan kolektif dan mempengaruhi stabilitas nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman makna dan konteks etika komunikasi publik yang ditunjukkan Ahmad Sahroni serta dampaknya terhadap stabilitas masyarakat. Melalui studi literatur, peneliti dapat menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku,

jurnal ilmiah, artikel berita, serta dokumen digital tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini memuat dua variabel utama, yaitu etika komunikasi publik dan stabilitas masyarakat. Etika komunikasi publik dianalisis melalui indikator kebenaran, tanggung jawab, kebijaksanaan dalam memilih kata, kesantunan berkomunikasi, serta transparansi terhadap publik. Sementara itu, stabilitas masyarakat dilihat dari respons warganet di media sosial, framing pemberitaan media, munculnya kontestasi atau solidaritas sosial, serta perubahan tingkat kepercayaan publik terhadap Ahmad Sahroni setelah pernyataannya viral. Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data dengan mengidentifikasi tema, memilih literatur relevan, serta melakukan interpretasi mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber primer berupa pernyataan langsung Sahroni di media massa atau media sosial, serta sumber sekunder seperti teori etika komunikasi, komunikasi publik, dan kajian stabilitas sosial. Data dicatat secara sistematis menggunakan lembar analisis dokumen, lalu dikategorikan ke dalam

tema seperti prinsip etika komunikasi, bentuk pernyataan, dan dampak sosial.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan menyaring informasi yang relevan terkait konteks pernyataan Sahroni dan reaksi publik. Kedua, penyajian data dalam bentuk uraian naratif berdasarkan tema-tema utama, sehingga memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar konsep. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui interpretasi mendalam terhadap seluruh data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pelanggaran atau pemenuhan etika komunikasi publik dapat memengaruhi stabilitas masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni bermula pada 22 Agustus 2025 ketika ia melakukan kunjungan kerja di lingkungan Polda Sumatera Utara. Dalam sesi wawancara terbuka, Sahroni menanggapi gelombang kritik atas rencana kenaikan tunjangan anggota DPR yang mencakup tunjangan perumahan, paket data komunikasi, dan uang beras. Kritik publik yang

terus meningkat kemudian memunculkan seruan agar DPR dievaluasi atau bahkan dibubarkan. Dalam situasi yang memanas tersebut, Sahroni menyampaikan pernyataan keras dengan menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapan ini terekam dalam video yang kemudian beredar luas di media sosial dan diberitakan oleh berbagai media daring nasional.



Gambar 1 Video Ahmad Sahroni yang berbicara “Orang Tolol Sedunia” pada laman Youtube Tribunnews

Bukti visual yang beredar memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi. Pada potongan video dari Tribunnews, Sahroni terlihat berdiri di depan mikrofon dengan latar bertuliskan “DPR”, disertai teks “Sebut Rakyat Tolol Hingga Ditantang Debat”. Dalam screenshot lain dari Tempo Video Channel, pernyataan itu ditampilkan sebagai headline dengan judul “Ahmad Sahroni: Hanya Orang Tolol yang Ingin Membubarkan DPR”.

Pengangkatan pernyataan tersebut oleh media arus utama menunjukkan bahwa isu ini tidak berhenti pada level percakapan publik biasa, tetapi sudah masuk ke agenda pemberitaan nasional. Sementara itu, unggahan dari akun Instagram acehbesarnow turut memperlihatkan respons dari masyarakat daerah yang menilai ucapan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat, sehingga memperluas cakupan kontroversi ke tingkat regional.



Gambar 2 Pemberitaan mengenai Ahmad Sahroni dari Media Online @acehbesarnow

Video ucapan Sahroni menyebar cepat di berbagai platform digital. Potongan video berdurasi singkat

diunggah oleh akun-akun berita daring, kanal TikTok politik, serta akun Instagram dengan jumlah pengikut besar. Unggahan tersebut menampilkan momen ketika Sahroni mengucapkan “tolol sedunia” dengan penekanan suara yang tinggi. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten dengan interaksi tinggi menyebabkan video tersebut muncul di linimasa jutaan pengguna, sehingga viralitasnya meningkat secara drastis. Media arus utama kemudian ikut memberitakan isu ini, membuat jangkauannya semakin luas bahkan hingga publik yang tidak aktif di media sosial.



Gambar 3 Pemberitaan pada media massa @OfficialNews di platform TikTok

Respons publik muncul beberapa jam setelah video viral. Akun Instagram Media massa menerima ribuan komentar bernada protes. Banyak warganet menilai bahwa ucapan tersebut mencerminkan sikap tidak etis dari seorang pejabat publik yang semestinya menjaga pilihan kata. Beberapa komentar menyebut pernyataan itu arogan dan merendahkan rakyat.



Gambar 4 Pemberitaan mengenai Demonstrasi pada laman media massa detik.com

Di beberapa kota besar, demonstrasi yang sebelumnya sudah berlangsung akibat isu politik nasional semakin menguat karena pernyataan Sahroni dianggap sebagai bukti ketidakharmonisan antara DPR dan masyarakat. Dengan demikian,

ucapan tersebut memperkuat tensi sosial yang sudah mengarah pada ketidakstabilan.

Media massa kemudian memberikan argumen lanjutan Sahroni. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap DPR adalah hal yang sah dalam demokrasi, tetapi menurutnya harus disampaikan secara beradab. Ia mempertanyakan apakah pembubaran DPR benar-benar merupakan solusi yang efektif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa banyak pihak yang menyerukan pembubaran DPR tidak memahami mekanisme kerja legislatif. Meskipun demikian, pemberitaan klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya meredam kontroversi yang terlanjur berkembang.

Berdasarkan bukti visual yang dikumpulkan, gaya bicara Ahmad Sahroni dalam momen tersebut memperlihatkan intensitas emosi yang tinggi. Nada bicara yang terdengar dalam video bersifat tajam dan tegas dengan peningkatan volume pada bagian tertentu, terutama saat menyebut frasa "tolol sedunia".



Gambar 5 Ahmad sahroni melakukan gerakan menunjuk pada narasinya pada laman youtube @tribunnews

Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak diucapkan dengan nada tenang, tetapi dengan tekanan emosional. Ekspresi wajah Sahroni terlihat serius dan tegang, dengan alis sedikit mengernyit dan tatapan mata fokus ke depan. Tidak ada tanda ekspresi relaks, sehingga memperkuat kesan bahwa ucapan itu disampaikan dalam keadaan emosional.

Selain itu, gestur tubuh turut memperkuat pesan yang ingin ia sampaikan. Dalam beberapa potongan video, Sahroni terlihat mengangkat jari telunjuk saat berbicara, sebuah gestur yang umumnya digunakan untuk menegaskan argumen atau menunjukkan otoritas. Tangannya juga aktif bergerak sejalan dengan intonasi, dan tubuhnya sedikit condong ke depan, memperlihatkan sikap konfrontatif terhadap kritik yang

diarahkan kepada DPR. Postur tubuh yang tegak dan gestur menunjuk ini membangun citra komunikasi yang agresif dan defensif, sehingga memberikan bobot tambahan pada persepsi publik bahwa ucapan tersebut disampaikan dalam suasana emosional.

Kontroversi yang muncul dari pernyataan ini memberikan dampak nyata terhadap dinamika sosial-politik di Indonesia pada periode tersebut. Reaksi publik yang meluas menunjukkan adanya jarak antara persepsi masyarakat tentang etika pejabat publik dan gaya komunikasi para politisi. Media menyebut bahwa pernyataan Sahroni memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap DPR, terutama di kalangan generasi muda yang aktif berpartisipasi dalam diskusi politik melalui media sosial. Isu yang awalnya terkait dengan tunjangan DPR akhirnya berkembang menjadi kritik terhadap cara komunikatif pejabat publik. Dalam konteks demonstrasi nasional pada Agustus hingga September 2025, pernyataan tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat gelombang protes dan memperlebar ketegangan antara masyarakat dan lembaga legislatif.

Pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia” menunjukkan pelanggaran jelas terhadap prinsip etika komunikasi publik menurut Johannesen, terutama aspek kebijaksanaan, penghormatan martabat manusia, dan tanggung jawab sosial. Pemilihan diksi yang merendahkan mengindikasikan ketidakmampuan komunikator membaca sensitivitas publik pada situasi politik yang sedang memanas. Alih-alih meredakan ketegangan, ucapan tersebut justru memperbesar jarak psikologis antara wakil rakyat dan masyarakat, serta memperkuat persepsi bahwa pejabat publik kurang menghargai kritik sebagai bagian dari demokrasi. Secara etis, tindakan ini menunjukkan komunikasi yang tidak memenuhi standar moral seorang pejabat negara.

Ditinjau melalui perspektif retorika Aristoteles, ucapan Sahroni mencerminkan ketidakseimbangan antara ethos, pathos, dan logos. Kredibilitas (ethos) menurun drastis karena gaya komunikasi yang emosional dan bernada merendahkan, bertentangan dengan citra pejabat publik yang idealnya bijak

dan mampu menahan diri. Unsur pathos sangat dominan terlihat dari intonasi tinggi, gestur emosional, dan ekspresi tegang, yang memicu reaksi emosional publik dan mempercepat penyebaran amarah di media sosial. Sementara itu, unsur logos hampir tidak muncul karena pernyataan tersebut tidak menyertakan alasan rasional atau argumentasi substantif mengenai isu pembubaran DPR. Ketidakseimbangan ketiga unsur ini menunjukkan bahwa pesan lebih bersifat konfrontatif daripada persuasif.

Viralitas video Sahroni di berbagai platform memperlihatkan bagaimana agenda setting media bekerja. Potongan video singkat yang beredar di TikTok, Instagram, dan YouTube menciptakan gelombang sebaran yang sangat cepat, diperkuat oleh algoritma yang memprioritaskan konten beremosi tinggi. Media arus utama seperti Tribun dan Tempo kemudian mengangkatnya menjadi headline, sehingga isu ini berkembang menjadi perhatian nasional. Fokus publik bergeser dari perdebatan substansi kebijakan DPR ke persoalan etika komunikasi pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyebarkan

informasi, tetapi juga membentuk prioritas isu yang dianggap penting oleh masyarakat.

Secara sosial-politik, kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi pejabat negara memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas sosial, sebagaimana dijelaskan Nimmo. Reaksi publik berupa komentar bernada marah, kritik keras, hingga tuntutan permintaan maaf menunjukkan erosi legitimasi terhadap Sahroni. Bahkan, aksi demonstrasi yang mengaitkan ucapan tersebut dengan isu politik nasional menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak terkendali dapat menjadi pemicu meningkatnya ketegangan sosial. Komunikasi politik yang ofensif pada akhirnya memperlemah hubungan dialogis antara wakil rakyat dan masyarakat, serta memperkuat ketidakpercayaan terhadap institusi politik.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang memperingatkan dampak negatif penggunaan bahasa provokatif oleh pejabat publik. Studi Fahrudin menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang kasar dapat memicu kegaduhan sosial, sedangkan penelitian Adli dkk menegaskan bahwa cara pemimpin

berkomunikasi memengaruhi reaksi emosional dan perilaku publik. Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dalam konteks komunikasi digital modern, di mana viralitas mempercepat eskalasi konflik dan membentuk opini publik dalam waktu singkat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik yang tidak etis memiliki potensi besar menciptakan ketidakstabilan sosial, terutama dalam lanskap politik pasca 2024 yang ditandai dengan sensitivitas publik yang semakin tinggi terhadap perilaku komunikasi pejabat negara.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia” merupakan bentuk komunikasi publik yang melanggar prinsip etika komunikasi, terutama terkait kebijaksanaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara. Dari perspektif retorika Aristoteles, gaya komunikasi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan serius antara

ethos, pathos, dan logos, di mana dominasi emosi dan absennya argumen rasional menurunkan kredibilitas komunikator serta memperlemah efektivitas pesan politik. Viralitas pernyataan itu di media sosial dan media arus utama melalui mekanisme agenda setting semakin memperbesar dampaknya, menciptakan fokus perhatian publik yang mengarah pada penilaian negatif terhadap etika komunikasi pejabat publik. Konsekuensinya, sebagaimana dijelaskan Nimmo dalam kajian komunikasi politik, pernyataan tersebut tidak hanya memicu reaksi emosional dan kritik luas dari masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial dan legitimasi lembaga DPR. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik yang tidak etis dalam era digital memiliki potensi besar memperburuk ketegangan sosial, merusak kepercayaan publik, dan mengganggu fungsi representatif lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. (1991). *Rhetoric* (W. Rhys Roberts, Trans.). Modern Library. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
- Detik.com. (2025, 22 Agustus). Ahmad Sahroni sebut pengunjuk rasa “tolol sedunia”. <https://www.detik.com/>
- Fahrudin, A. (2021). Etika komunikasi pejabat publik dalam penanganan pandemi Covid-19. *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(2), 109–120.
- Gramedia.com. (2025). Teori agenda setting McCombs dan Shaw. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-agenda-setting/>
- Johannesen, R. L. (2008). *Ethics in human communication* (6th ed.). Waveland Press.
- Khoiriyah, S. U. (2021). Etika komunikasi krisis pemerintah di media sosial terhadap penanganan Covid-19 perspektif al-Qur'an. *Tafsire: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1).
- Maskuri, M. I. N. (2022). Etika narasi komunikasi politik berlandaskan ideologi Pancasila. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 37(1), 75–90.
- Nimmo, D. (1999). *The changing concept of public opinion in mass society*. Prentice Hall.
- Nimmo, D. (2000). *Political communication: A critical introduction*. Ablex Publishing.
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication*. University of Illinois Press.
- Simandjuntak, R. (2024). Dampak politik dan sosial dari upaya pemberhentian presiden. *Retorika*:

Jurnal Politik dan Sosial, 12(1), 55–
70.